

Ringkasan Eksekutif

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Tujuan meningkatnya pembangunan ketenagakerjaan, indikator tujuan indeks pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2024 dengan **target 70,02 persen**, dapat direalisasikan pada Tahun 2024 sebesar **100 persen**. Sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja, indikator sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja dengan **target 75,10%**, dapat direalisasikan sebesar **71,71 persen** pada Tahun 2024.
2. Tujuan membangun infrastruktur strategi dan infrastruktur dasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, indikator tujuan jumlah Kawasan transmigrasi yang produktif, berdaya saing dan sejahtera, dengan **target 5 (lima) kawasan** di Tahun 2024 dapat **terrealiasi 5(lima) Kawasan**. Sasaran terselenggaranya pembangunan transmigrasi, indikator sasaran persentase peningkatan kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan **target 57,14%**, dapat direalisasikan sebesar **64,35 persen** pada Tahun 2024.
3. Tujuan meningkatnya tata kelola OPD, indikator tujuan nilai SAKIP Disnakertrans. Sasaran meningkatnya tata kelola OPD, dengan indikator sasaran nilai SAKIP Disnakertrans dengan target indikator kinerja nilai SAKIP **target BB**, dapat direalisasikan sebesar **100 persen** pada Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengadakan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja sebanyak 1.930 pencari kerja yang diadakan di SATPEL PK Bengkulu dan UPTD Bengkulu Tengah sebanyak 21 paket, UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang 14 paket, UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan 7 paket, UPTD. Pelatihan Kerja Seluma 5 paket dan UPTD. Pelatihan Kerja Mukomuko 9 paket, dan UPTD Bengkulu Utara 7 paket yang bersumber dari dana APBD dan APBN dengan jumlah paket mencapai 63 paket kejuruan di UPTD. Pencari Kerja yang mendaftar keseluruhan **berjumlah 2.189 Orang** dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan **sebanyak 1.930 Orang**, sehingga capaian kinerja dapat tercapai **sebesar 88,16 persen**, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2023 **meningkat sebanyak 830 Orang**.

Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun dengan persentase capaian kinerja 100 persen, dimana dapat terselesainya penyusunan Buku Rencana Tenaga Kerja Makro periode Tahun 2024-2029, persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi **sebesar 89,53 persen**, persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar **62,72 persen**, persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

sebesar 60 persen, persentase perusahaan yang taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja) **sebesar 100 persen**.

Jumlah pembangunan kawasan transmigrasi **sebesar 100 persen**, jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan **sebesar 64,35 persen**, dan persentase jenis kegiatan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah **sebesar 100 persen**. Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan menunjukkan tingkat capaian rata-rata sebesar **90,25 persen**.

Jumlah pagu anggaran sebesar Rp.40.220.023.229,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 39.300.251.051, untuk capaian realisasi keuangan APBD dan APBN sebesar **97,69 persen** sedangkan realisasi fisik mencapai **98,11 persen**, yang berarti target-target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kinerja hampir tercapai secara maksimal. Capaian realisasi keuangan melalui dana APBD dan APBN pada tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu telah mencapai angka **97,69%** (sembilan puluh tujuh persen) dengan **98,11%** realisasi fisik, sedangkan **pada Tahun 2023 sebesar 97,50%** (Sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen), sehingga dapat **meningkat sebesar 0,19%** (nol koma Sembilan belas persen).

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam Penyusunan Dokumen “Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024” ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian Dokumen “Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024” ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dimasa mendatang.

Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Bengkulu



Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19811225 200604 1 003

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	lii
Daftar Isi	lv
Daftar Tabel	v
 BAB I Pendahuluan	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Organisasi	6
E. Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Manusia	8
 BAB II Perencanaan Strategis Dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan	9
C. Sasaran	10
D. Indikator Kinerja	10
E. Strategi	10
F. Kebijakan	10
G. Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan	14
H. Perjanjian Kinerja	15
 BAB III Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	
A. Akuntabilitas Kinerja	16
- Sasaran 1	16
- Sasaran 2	34
- Sasaran 3	40
B. Akuntabilitas Keuangan	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	2
Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2
Tabel 1.3. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu / JFT	3
Tabel 2.1. Rencana Strategis	9
Tabel 2.2. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	10
Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran	13
Tabel 2.4. Program dan Indikator Kinerja Output	14
Tabel 3.1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	16
Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	18
Tabel 3.3. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	20
Tabel 3.4. Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	22
Tabel 3.5. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2024	24
Tabel 3.6. Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	31
Tabel 3.7. Persentase Perusahaan Taat NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria)	31
Tabel 3.8. Unit Permukiman Transmigrasi sampai dengan Tahun 2024	36
Tabel 3.9. Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	37
Tabel 3.10. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	40
Tabel 3.11. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu TA 2024	40
Tabel 3.12. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
Tabel 3.13. Pengukuran Realisasi Keuangan Tahun 2024	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan
5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok "***melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi***". Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT Dinas; bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah maka pembangunan bidang ketenagakerjaan yang diarahkan pada kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dalam rangka pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan bidang ketransmigrasian diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bengkulu yang akan meningkatkan kesejahteraan warga transmigran dan penduduk sekitarnya.

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Kekuatan personel dan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Menurut Golongan

Tabel. 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV.c	1 Orang
2	IV.b	8 Orang
3	IV.a	36 Orang
4	III.d	84 Orang
5	III.c	42 Orang
6	III.b	22 Orang
7	III.a	8 Orang
8	II.d	1 Orang
9	II.c	2 Orang
10	II.b	1 Orang
11	II.a	2 Orang
JUMLAH SELURUH		207 Orang

b) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel. 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA	15 Orang
2	D3/Sarjana Muda	13 Orang
3	S1	142 Orang
4	S2	36 Orang
5	S3	1 Orang
JUMLAH SELURUH		207 Orang

c) Pejabat Fungsional Tertentu / JFT

Jumlah pejabat fungsional pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 77 orang terdiri dari :

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu / JFT

No	JABATAN FUNGSIONAL	ABK	BEZETTING	KEKURANGAN/KELEBIHAN
1	Pengantar Kerja Ahli Pertama	5	1	-4
2	Pengantar Kerja Ahli Muda	4	2	-2
3	Pengantar Kerja Ahli Madya	23	5	-18
4	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	9	1	-8
5	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	3	2	-1
6	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	10	9	-1
7	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	8	1	-7
8	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	19	10	-9
9	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	10	8	-2
10	Instruktur Terampil	21	1	-20
11	Instruktur Pelaksana Lanjutan	3	1	-2
12	Instruktur Mahir	21	0	-21
13	Instruktur Penyelia	9	9	0
14	Instruktur Ahli Pertama	12	2	-10
15	Instruktur Muda	31	19	-12
16	Instruktur Ahli Madya	23	5	-18
17	Widyaiswara	1	1	0
18	Analisis sdm aparatur ahli pertama	1	1	0
19	Analisis kepegawaian ahli muda	22	18	-4
20	Analisis sdm aparatur ahli muda	1	1	0
21	Perencana muda1	1	1	0
22	Analisis keuangan pusat dan daerah jumlah1	1	1	0
23	Penggerak swadaya masyarakat ahli muda	4	4	0
JUMLAH SELURUH		242	103	-139

- d) Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki :
- Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat di halaman (lampiran)

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa kegiatan seperti pelatihan tetap bisa terlaksanakan dengan baik diantaranya:

- Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan didukung program sebagai berikut :
 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Persentase Dokumen Rencana Tenaga kerja yang tersusun;
 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi;
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran persentase tenaga kerja yang di tempatkan;
 4. Program Hubungan Industrial dengan indikator sasaran Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator sasaran Persentase Perusahaan Taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja);
 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator sasaran Jumlah Pembangunan kawasan Transmigrasi;
 7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan indikator sasaran Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan.
 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator sasaran Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

C. Aspek Strategis Organisasi

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam penilaian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu selalu menyusun Laporan Kinerja setiap tahun sebagai bagian pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan yang menjadi pelaksanaan tugas rutin. Laporan Kinerja ini disusun sebagai indikator penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun tersebut.

Peringatan Bulan K3 Nasional dilakukan setiap tahun sebagai upaya pemerintah dalam mempromosikan K3 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) Nasional adalah rangkaian perayaan yang diperingati mulai dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari di Indonesia.

Peringatan Bulan K3 Nasional dilakukan setiap tahun sebagai upaya pemerintah dalam mempromosikan K3 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor, 50 tahun 2012 penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 244 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024. Peringatan Hari K3 Nasional ditetapkan pertama kali sejak tahun 1984 melalui penerbitan Kepmenaker No. Kep. 13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3. Sambutan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsayah dalam kegiatan K3 dipusatkan di halaman parkir Bengkulu Indah Mall selaku pembina upacara Wagub Bengkulu menekankan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai Thema hari ini Budayakan K3 Sehat dan Selamat, agar dapat bekerja dengan nyaman, sehat dan layak. Salah satunya adalah pentingnya mempertahankan derajat kesehatan bagi pekerja dimanapun bekerja yang berkelanjutan serta daya saing secara nasional di Era Global saat ini. "Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak hanya mengusung penyusunan regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan," kata Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Bapak Rosjonsayah pada upacara Bulan K3 Bengkulu, Kamis 1 Januari 2024. Selain itu, sambung Rosjonsyah, juga ada hal yang penting dalam pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya K3 yang baik. Dengan adanya budaya K3 yang unggul maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan dapat ditekan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Lebih lanjut, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Bapak Rosjonsayah juga mengajak semua pemangku kepentingan melakukan koordinasi, bersinergi dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kemandirian K3 dengan terus menggelorakan K3 di setiap kesempatan baik pada tingkat nasional regional dan internasional maupun pada forum yang strategis.

Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsayah berharap seluruh lapisan Masyarakat baik umum, industri, para cendekiawan, akademisi, organisasi profesi dan asosiasi dan pihak terkait lainnya dapat termotivasi untuk mendukung dan berperan aktif dalam terciptanya pelaksanaan K3 secara mandiri, mengembangkan dan mempromosikan serta membudayakan K3. **"Sehingga tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan menuju kecelakaan yang minim guna meningkatkan produktivitas nasional dapat terwujud secara nyata".**

Semoga peringatan Bulan K3 tahun ini dapat diikuti oleh semua pemangku kepentingan dengan lebih bermakna untuk bersinergi bersama mengedepankan K3 sebagai prioritas bekerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transigrasi Provinsi Bengkulu Edwar Happy menambahkan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati hari disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bulan K3 Provinsi Bengkulu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan tujuan menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas serta terwujudnya kemandirian masyarakat berbudaya K3.

“Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Provinsi Bengkulu merupakan komitmen dalam melaksanakan penerapan K3 di wilayah Provinsi Bengkulu. Kami mempersiapkan diri menjadi Global City tetap akan memastikan bahwa pelaksanaan K3 di tempat kerja harus tetap terlaksana dengan baik.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Organisasi

Dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih menghadapi beberapa kendala terutama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas. Adapun kendala yaitu persoalan-persoalan yang bukan saja dibidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial, politik dan ketenagakerjaan. Sehingga dampak yang meliputi pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, terjadi berbagai perubahan termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Dimana dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan populasi yang terus bertambah dan perubahan dinamika ekonomi global, berbagai isu ketenagakerjaan terus muncul, mulai dari pengangguran, rendahnya keterampilan tenaga kerja, hingga kurangnya perlindungan bagi pekerja informal.

▪ 5 Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia:

1. Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi

Meskipun tingkat pengangguran di Indonesia cenderung menurun, angka ini masih cukup signifikan, terutama di kalangan lulusan muda. Banyak lulusan universitas kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Masalah ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

2. Rendahnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih tergolong memiliki keterampilan rendah. Hal ini membuat mereka kurang kompetitif, terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Kesenjangan keterampilan ini semakin terasa dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor teknologi dan industri kreatif.

3. Ketergantungan pada Sektor Informal

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal yang tidak menyediakan jaminan sosial atau perlindungan hukum. Pekerja di sektor ini sering kali tidak memiliki kontrak kerja resmi dan tidak mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan, cuti, atau pensiun.

4. Kurangnya Kesempatan Kerja di Daerah Tertinggal

Ketimpangan pembangunan antar wilayah menyebabkan daerah-daerah tertinggal sulit menciptakan lapangan kerja baru. Sebagian besar lapangan kerja terkonsentrasi di kota-kota besar, yang memicu urbanisasi dan peningkatan persaingan di kota-kota tersebut.

5. Kesenjangan Upah

Kesenjangan upah antara pekerja di sektor formal dan informal, serta antara pekerja laki-laki dan perempuan, masih menjadi masalah yang signifikan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan produktivitas tenaga kerja.

▪ Cara Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia:

1. Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Vokasional

Salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya keterampilan tenaga kerja adalah dengan memperluas program pelatihan dan pendidikan vokasional (kejuruan). Program ini dapat membantu tenaga kerja mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama di bidang teknologi, manufaktur, dan layanan digital.

2. Mendorong Pertumbuhan Industri di Daerah

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk membuka lapangan kerja di daerah-daerah tertinggal. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat di luar kota besar.

3. Memperkuat Perlindungan untuk Pekerja Informal

Peningkatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pekerja informal sangat diperlukan. Pemerintah dapat memperluas program jaminan sosial dan memberikan insentif bagi pekerja informal untuk mendaftarkan diri dalam program tersebut.

4. Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Untuk mengatasi kesenjangan upah dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, perusahaan dan pemerintah harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah gender. Langkah ini mencakup kebijakan cuti melahirkan, fleksibilitas kerja, dan program pemberdayaan perempuan di tempat kerja.

5. Mengintegrasikan Teknologi ke Dalam Pasar Kerja

Dengan meningkatnya digitalisasi, pemerintah dan perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti melalui platform online atau gig economy. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi juga dapat membantu tenaga kerja lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja modern.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengangguran, rendahnya keterampilan, dan kurangnya perlindungan pekerja adalah isu yang harus segera diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan pasar kerja yang lebih adil dan produktif.

E. Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar Bagan Struktur di (halaman lampiran).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tabel 2.1

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Visi :	Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
Misi I :	Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola OPD	Meningkatnya Tata Kelola OPD	1. Peningkatan Nilai Sakip Disnakertrans	1. Peningkatan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan :Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis kerangka
		2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	2. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang mampu menempatkan dan menyalurkan Tenaga kerja berkualitas di dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
		3.Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	3.Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja
		4.Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenagakerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,	4.Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
Membangun Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi	1.menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah Provinsi	1.kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi.
		2. Peningkatan kawasan Transmigrasi yang ada disetiap Kabupaten	2. Mempercepat Peningkatan kawasan Transmigrasi untuk masuk ke dalam Program Nasional
		3.Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar	3.Peningkatan kemampuan melalui pelatihan keterampilan

B. Tujuan

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 4, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sehubungan dengan harapan-harapan pemerintah yang akan dicapai dalam pembangunan umumnya dan pembangunan ketenagakerjaan khususnya maka

perlu disiapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif yang dibutuhkan terkait perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan pekerja.

C. Sasaran

Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu yaitu Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja serta Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu yaitu menaikkan nilai SAKIP , meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terbentuknya kawasan transmigrasi yang produktif, berdaya saing dan sejahtera serta peningkatan kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan.

E. Strategi

Melakukan komitmen untuk memprioritaskan ketenagakerjaan sebagai subyek dan objek pembangunan. Mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan cukup luas dan kompleks, maka peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, maupun program menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan.

F. Kebijakan

Kebijakan ini berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, yang nantinya diharapkan dapat berdampak baik langsung maupun tidak langsung dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu diantaranya kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, kebijakan kesehatan, kebijakan investasi, Kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, kebijakan pendidikan dan pelatihan, kebijakan penempatan tenaga kerja, kebijakan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kebijakan pengawasan.

Tabel 2.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1.	Membangun ekonomi dan infrastruktur	1. Meningkatnya Tatakelola OPD	Nilai SAKIP Disnakertrans	1. Peningkatan Nilai SAKIP Disnakertrans	1. Peningkatan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah

	secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.	1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan Kualitas dan SDM Kabupaten/ Kota dalam Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 2. Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis kerangka
				3. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di dalam dan luar negeri mendukung <i>skilled based industries</i>
				4. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	4. Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja
				5. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja waktu istirahat.	5. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem
				dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan	

				tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenagakerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	
		Mengembangkan Kawasan Transmigrasi yang Produktif	Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi	1. Menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah Provinsi	1. Peningkatan Kerjasama Bidang Ketransmigrasian serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi
				2. Peningkatan kawasan transmigrasi yang ada di setiap Kabupaten	2. Peningkatan Percepatan Kawasan Transmigrasi untuk Masuk kedalam Program Nasional
				3. Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan warga sekitar	3. Peningkatan kemampuan melalui pelatihan keterampilan

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		3	4	5	6	7	8
1	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Disnakertrans							
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Disnakertrans	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Tujuan :Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	63,64%	69,98%	68,98%	69,50%	70,02%	71,00%	72,50%
	Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,73%	72,00%	73,15%	74,25%	75,10%	76,15%	77,22%
3	Tujuan : Membangun Infrastruktur Strategi dan Infrastruktur Dasar Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	1 Kawasan	1 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan
	Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	0%	20%	56%	57,14%	57,14	71,42	85,71

st Bengkulu, Januari 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU 07



Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19811225 200604 1 003

G. Program / Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Perjanjian Kinerja telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dan menjadi bagian integral dari buku Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Tabel 2.4.
Program dan Indikator Kinerja Output

No	Nama Program	Tujuan Setiap Program	Indikator Kinerja Output Program	Jumlah Kegiatan Program dan Total Dana Program	Sumber Dana Kegiatan setiap Program
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya tata kelola Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 34.605.023.229,-	APBD
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	Rp. 221.000.000,-	APBD
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	Rp. 3.496.000.000,-	APBD dan APBN
			Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rp. 120.000.000,-	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Rp. 600.000.000,-	APBD
5	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 415.000.000,-	APBD
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja)	Rp. 160.000.000,-	APBD
				Rp. 110.000.000,-	APBD / UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
				Rp. 100.000.000,-	APBD / UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
				Rp. 80.000.000,-	APBD / UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Membangun Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 120.000.000,-	APBD
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Membangun Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Rp. 220.000.000,-	APBD
TOTAL				Rp. 40.220.023.229,-	

H. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada di halaman (lampiran).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran 1 : MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Tabel 3.1
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

NO.	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target Thun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase	70,02%	56,49%	59,75%	63,20%	90,25%

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Rumus :

Persentase Tingkat Capaian =

Realisasi

Target

X

100

=

63,20

70,02

X

100

= 90,25%

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja pembangunan ketenagakerjaan setiap provinsi dan nasional yang disorot menggunakan 9 Indikator Utama dan 25 Subindikator yang merupakan penjabaran dari empat tujuan pokok pembangunan ketenagakerjaan, yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Tahun 2024 realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan **ditargetkan sebesar 70,02 persen**, dan tercapai sebesar **63,20 persen**, meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tercapai **sebesar 59,75** persen, dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan **meningkat sebesar 3.45 persen**, apabila dibandingkan dengan Tahun 2023.

Capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebesar 90,25 persen, sedangkan capaian Tahun 2023 sebesar 85,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat sebesar 5,25 persen. Salah satu yang mendorong peningkatan indeks ini adalah bertambahnya jumlah provinsi yang telah Menyusun buku Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks 2024	Aktual 2024
Perencanaan Tenaga Kerja	8.71667	87.16667
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8.71667	87.16667
Penduduk dan Tenaga Kerja	6.92616	36.36923
Persentase NEET (15-24 tahun)	0.98560	21.76636
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1.90600	1.88000
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2.89568	3.41728
Persentase Setengah Pengangguran	1.13888	9.30559
Kesempatan Kerja	7.53999	270.62950
Persentase Tenaga Kerja Formal	2.09688	32.23178
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian	1.96225	49.02541
Proporsi LPINP untuk Laki-laki	1.59398	46.03610
Proporsi LPINP untuk Perempuan	1.31347	52.89300
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)	0.57341	90.44321
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11.70000	66.86755
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4.50000	17.85311
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6.00000	22.34777
Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	1.20000	26.66667
Produktivitas Tenaga Kerja	0.45044	49.12610
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.00000	48.00000
Laju Pertumbuhan PRDB per Tenaga kerja	0.45044	1.12610
Hubungan Industrial	3.50389	49.52479
Tingkat Peraturan (PP) yang Disahkan	0.19765	6.58850
Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan	0.15215	6.08599
Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	0.73086	36.54321
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2.42323	0.30709
Kondisi Lingkungan Kerja	5.95185	78.41225
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0.00000	3.33333
Tingkat Kecelakaan Kerja	2.95185	0.01605
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	3.00000	75.06287
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8.41579	100.98946
Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP	8.41579	100.98946
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10.00000	113.93526
Tingkat Perusahaan yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4.00000	93.54568
Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yang menjadi Peserta BPJS	6.00000	20.38958
IPK	63.20479	

▪ Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun

Persentase Dokumen Rencana Kerja yang disusun pada Tahun 2021 mencapai 50% (kondisi pada awal periode Renstra), target capaian pada Tahun 2022 sebesar 50%, target pada Tahun 2023 sebesar 60%, target pada Tahun 2024 sebesar 70%, Tahun 2025 sebesar 80%, Tahun 2026 sebesar 90%. Provinsi Bengkulu telah menyusun Buku RTK Makro tahun 2021-2024.

Sehingga **capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100 persen**. Hal ini dikarenakan dengan berakhirnya masa berlaku buku RTK Makro ini, maka dapat disusun kembali Buku RTK Makro untuk periode Tahun 2024-2029, dengan melibatkan tim Tenaga Ahli Penyusunan Buku RTK Provinsi dari Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro kemnaker RI sebanyak 2 (dua) orang tenaga ahli. Pada Tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menyusun kembali Buku Rencana Tenaga Kerja Makro periode Tahun 2024-2029 serta Kabupaten yang telah menyusun Buku RTK Makro pada tahun ini sebanyak 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) telah melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 di Hotel Nala Sea Side Bengkulu pada tanggal 30 Juli sampai dengan 02 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini membahas tentang juknis Penyusunan Buku Rencana Tenaga Kerja Makro Periode Tahun 2024-2029. Peserta kegiatan pendampingan ini diberikan simulasi dan contoh cara menyusun Buku RTK Makro dari Bab I sampai dengan Bab II oleh narasumber dari Pusat Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Ibu Rlni Nurhayati, S.T., M.T dan tim pendamping lainnya. Untuk kabupaten yang belum menyelesaikan penyusunan Buku RTK tahun ini diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan d tahun berikutnya dengan didampingi oleh tim penyusunan Buku RTK Makro dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan Tim Pendampin dari Pusat Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dari 9 Kabupaten 1 Kota di Tahun 2024 hanya tiga kabupaten yang telah menyelesaikan penyusunan Buku RTK Makro periode Tahun 2024-2029, untuk kabupaten lainnya masih sampai pada tahap penyusunan bab I dan II dikarenakan masih terbatasnya SDM dan anggaran, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat menyelesaikan penyusunan sampai pada bab akhir.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 3.2
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

NO.	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	75,10%	69,71%	70,91%	71,71%	79,61

▪ Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase Tingkat Capaian =

Realisasi

Target

X 100

= $\frac{71,71}{75,10}$

X 100

= 95,48%

Jumlah angkatan kerja pada **Agustus 2024 sebanyak 1.136.573 orang, naik 29.113 orang dibanding Agustus 2023**. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) data *rilis BPS per Agustus 2024* pada Tahun **2023 sebesar 70,91 persen** sedangkan pada Tahun **2024 71,71 persen sehingga naik sebesar 0,80 persen poin**. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) data *rilis BPS per Agustus 2024* pada Tahun **2023 3,42 persen** sedangkan Tahun **2024 sebesar 3,11 persen**, sehingga mengalami **penurunan sebesar 0,31 persen**. Hal ini disebabkan oleh penduduk usia kerja data *rilis BPS per Agustus 2024* sebanyak 1.561,74 jiwa pada Tahun 2023 sedangkan Tahun 2024 sebanyak 1.585,00 jiwa, sehingga Penduduk usia kerja meningkat pada tahun 2024 apabila dibandingkan tahun 2023. Angkatan Kerja pada Tahun 2023 sebanyak 1.107,46 jiwa meningkat pada Tahun 2024 sebanyak 1.136,57 jiwa. Penduduk bekerja sebanyak 1.069,62 jiwa, meningkat pada Tahun 2024 sebanyak 1.101,23 jiwa. **Penganggur pada Tahun 2023 sebanyak 37,84 jiwa, untuk tingkat pengangguran ini menurun pada Tahun 2024 sebanyak 35, 34 atau menurun sebesar 2,5 persen**. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024 **sebesar 95,48 persen**.

Upah minimum, rerata lama sekolah dan Penduduk usia kerja juga dapat mempengaruhi TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi pasar tenaga kerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi secara tidak langsung menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Tingginya TPAK diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan memberantas pengangguran yang menjadi inti masalah perekonomian di Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pekerja dalam kegiatan perekonomian yaitu kebijakan upah minimum. Bagi para pekerja yang waktu bekerjanya penuh waktu maupun paruh waktu mereka akan mendapat upah atau gaji sebagai imbalan sebagai balasan untuk partisipasinya dalam kegiatan ekonomi bentuk upah atau gaji.

Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 13,56 persen

(281,36 ribu orang), berkurang sebesar 0,48 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen (288,46 ribu orang).

Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Bengkulu (data BPS Mei 2024)

Lapangan Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan				Jumlah Total
	<= SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1. Pertanian/Agriculture	255.379	103.697	112.500	12.457	484.033
2. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry	46.207	27.437	45.004	9.416	128.064
3. Jasa/Services	76.034	62.516	179.130	139.838	457.518
Jumlah/Total	377.620	193.650	336.634	161.711	1.069.615

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utamanya di Provinsi Bengkulu (data BPS Mei 2024)

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah/Total
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	151.536	81.008	232.544
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	152.297	46.959	199.256
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	27.061	7.637	34.698
Buruh/Karyawan/Pegawai	189.239	120.819	310.058
Pekerja bebas di Pertanian	50.388	14.213	64.601
Pekerja bebas di nonpertanian	43.694	5.692	49.386
Pekerja Keluarga	43.027	136.045	179.072
Jumlah/Total	657.242	412.373	1.069.615

- Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Tabel 3.3
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

- Persentase Pencari Kerja yang dilatih

NO.	PELAKSANA	SATUAN	PESERTA	PENDAFTAR
			2024	2024
1	SATPEL PK Bengkulu	Org	496	577
2	UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang	Org	512	583
3	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan	Org	298	303

4	UPTD. Seluma	Org	96	123
5	UPTD. Mukomuko	Org	192	233
6	Bengkulu Tengah	Org	176	200
7.	Bengkulu Utara	Org	160	170
TOTAL		Org	1.930	2.189

Jumlah peserta pelatihan Tahun **2024 sebanyak 1.930 Orang** sedangkan pada Tahun 2023 jumlah **peserta pelatihan 1.100 Orang**, sehingga jumlah peserta pelatihan mengalami peningkatan sebanyak 830 Orang. Untuk capaian persentase Pencari Kerja yang dilatih pada Tahun 2024 sebesar **88,16 persen**, sedangkan Tahun 2023 tercapai 98,30 persen, menurunnya capaian ini disebabkan karena terbatasnya jumlah peserta pelatihan untuk setiap paket pelatihan, dimana setiap paket dibatasi berjumlah 16 Orang, sedangkan minat masyarakat semakin tinggi sehingga jumlah pendaftar semakin meningkat setiap tahunnya, selain itu Peserta yang mendaftar masih banyak yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dari pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI, diantaranya masih banyak pendaftar yang berstatus mahasiswa, dan bekerja tidak tetap, sedangkan peserta harus mengikuti pelatihan dengan efektif, efisien dan akuntabel, pelatihan dilaksanakan setiap hari sehingga tidak dapat mengganggu pekerjaan yang lain. Pada Tahun 2024 ditargetkan Jumlah peserta Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebanyak **786 Orang (APBD dan APBN)** dan dapat terealisasi sebanyak **1.930 Orang** yang mengikuti pelatihan di SATPEL PK Bengkulu, UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang, Bengkulu Selatan, Seluma, Mukomuko, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Bertambahnya jumlah pendaftar dan peserta pelatihan **dikarenakan** Masyarakat sudah mulai dapat memahami dan mengerti manfaat dari mengikuti pelatihan di BLK yaitu dapat menjadi bekal para peserta untuk memasuki dunia kerja selain itu juga masyarakat sudah mengerti bahwa ada fasilitas dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang memberikan wadah bagi pencari kerja untuk terus berlatih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dibidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yaitu di Balai Latihan Kerja atau BLK merupakan sebuah tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.

5 manfaat pelatihan di BLK:

1. Balai Latihan Kerja atau BLK merupakan tempat untuk meningkatkan kompetisi para peserta
2. Para peserta dapat memilih pelatihan kompetensi yang diinginkan
3. Peserta pelatihan terbatas, maka bagi yang mengikuti pelatihan kerja dapat mengikuti materi dengan semaksimal mungkin dengan tenaga pengajar/instruktur yang professional sesuai dengan kejuruan yang diikuti.

3. Peserta pelatihan terbatas, maka bagi yang mengikuti pelatihan kerja dapat mengikuti materi dengan semaksimal mungkin dengan tenaga pengajar/instruktur yang professional sesuai dengan kejuruan yang diikuti.
4. Dapat sertifikasi kompetensi sebagai tanda bahwa peserta kompeten
5. Pelatihan dibiayai oleh pemerintah.

5 poin manfaat mengikuti pelatihan di BLK tersebut bisa menjadi bekal masuk ke pasar kerja, wirausaha, serta meningkatkan produktivitas. Sebelum memasuki dunia kerja, dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengasah soft skill maupun hard skill.

Persentase Peserta yang dilatih, dengan rumus :

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan

X 100

Jumlah Peserta Yang Mendaftar

- Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Tabel 3.4

Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

NO.	PELAKSANA	SATUAN	LULUS	PESERTA
			UJK 2024	2024
1	SATPEL PK Bengkulu	Org	458	496
2	UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang	Org	454	512
3	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan	Org	294	298
4	UPTD. Pelatihan Seluma	Org	56	96
5	UPTD. Pelatihan Mukomuko	Org	133	192
6	UPTD. Pelatihan Bengkulu Tengah	Org	176	176
7.	UPTD. Pelatihan Bengkulu Utara	Org	157	160
TOTAL		Org	1.728	1.930

Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Tahun 2024 sebesar 89,53 persen.

Dimana Provinsi Bengkulu melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan jumlah **peserta sebanyak 1.930 Orang** sedangkan yang mendapatkan **sertifikasi sebanyak 1.728 Orang**, ini tentunya sangat meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu **sebanyak 1.018 Orang**, diantaranya kejuruan Service Sepeda Motor Sistem Motor Konvensional, Pengoperasian Mesin Bubut, Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Desain Grafis Muda, Bakery, Operator Komputer /TIK, Penjahit, Bisnis Manajemen, Tata Boga / Prosesing Otomotif dan masih banyak jenis kejuruan lainnya. Kejuruan yang paling banyak diminati peserta diantaranya kejuruan Operator Komputer /TIK, Penjahit, Bisnis Manajemen, Tata Boga / Prosesing.

Alasan mengapa kejuruan tersebut yang lebih banyak diminati dikarenakan para peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelaksanaan pelatihan dapat membuka usaha mandiri seperti menjahit dan catering selain daripada itu untuk lulusan bisnis perkantoran dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan dikarenakan mereka sudah memiliki skill yang siap untuk ditempatkan bekerja.

Dibandingkan pada tahun sebelumnya Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berjumlah **1.018 Orang** sedangkan pada **Tahun 2024 sebanyak 1.728 Orang** yang mendapatkan sertifikasi, dengan ini mengalami kenaikan **sebanyak 710 Orang** atau capaian realisasi kinerja meningkat sebesar **169,74 persen** dari tahun sebelumnya, peningkatan ini tentunya **dikarenakan** jumlah peserta pelatihan semakin meningkat karena masyarakat mulai memahami pentingnya mengikuti pelatihan sehingga dapat bermanfaat untuk mencari pekerjaan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak.

▪ **Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan**

Mengikuti bursa kerja adalah sebuah kesempatan bagi para pencari kerja tidak hanya untuk memperoleh pekerjaan namun juga secara langsung bertatap muka menjalin networking dengan HR personalia dari berbagai perusahaan. Selain itu kamu juga dapat berlatih wawancara kerja karena akan berkomunikasi dengan banyak rekruter secara langsung. Mencari lowongan kerja secara online biasanya terbatas dan terkadang tidak cocok dengan pendidikan, keahlian ataupun pengalaman kerjamu sebelumnya. Dengan mengikuti bursa kerja kamu memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dan mengetahui semua jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. 50-80 persen pekerjaan diisi melalui networking dan lowongan yang dipasang di media online mungkin hanya sebanyak 30 persen dari total pekerjaan yang dibutuhkan. Bursa kerja bisa menjadi kesempatan bagi para pencari kerja yang belum memiliki networking yang luas untuk meningkatkan peluang berkarir.

Selain melalui online, job fair adalah tempat yang efektif bagi detikers untuk mencari dan melamar pekerjaan. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan yang biasanya berpartisipasi dalam acara ini. Job fair menjadi tempat yang pas bagi pencari kerja karena perusahaan yang ikut serta biasanya tengah membuka atau tersedia posisi kosong. Karena itu, job seeker yang datang ke job fair dapat langsung melamar posisi terbuka di perusahaan tersebut. Sejumlah perusahaan yang hadir di job fair umumnya diwakilkan oleh para perekrut atau HRD masing-masing. Di sini, mereka mencari kandidat tepat yang cocok untuk mengisi posisi di perusahaan dan memungkinkan untuk mewawancarai langsung calon kandidat di tempat. Job Fair Tahun 2024 dengan jumlah peserta **336 Orang**, lowongan pekerjaan yang tersedia **4900** dari **36 perusahaan** yang mengikuti Job Fair, dan jumlah yang ditempatkan sebanyak **175 Orang** (data Job Fair Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara). Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2024 sebesar **62,72 persen**.

Jumlah pelamar pada Job Fair tahun 2023 **sebanyak 279 Orang** dan yang ditempatkan sebanyak **72 Orang**, dengan ini dapat dianalisis jumlah orang yang ditempatkan mengalami kenaikan sebanyak **103 Orang**, hal ini disebabkan **karena** Masyarakat dapat merasakan manfaat dari Job Fair ini yaitu skala perusahaan yang ada di Job Fair biasanya besar, bahkan sebagian jarang didengar. Disinilah dapat eksplor lebih jauh tentang perusahaan, jadi referensi bertambah banyak. Dengan bertambahnya referensi, peluang untuk diterima di suatu perusahaan besar. Tidak hanya swasta, beberapa perusahaan BUMN juga sering bergabung dalam suatu Job Fair.

▪ **Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2024**

Tabel 3.5
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	100	175
2	Jumlah Pencari Kerja terdaftar pada Job Fair	Orang	279	336

Dengan rumus :

Pencari Kerja Yang Ditempatkan :

Realisasi Tenaga Kerja yang di Tempatkan

X 100

Target Pencari Kerja Terdaftar pada Job Fair

▪ **Pemagangan Dalam Negeri (OCOP)**

Pemerintah Daerah (Pemprov Bengkulu) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar pelatihan magang dalam negeri. Pemagangan dalam negeri Tahun 2024 ditargetkan sebanyak **184 Orang** dapat direalisasikan sebanyak **183 Orang** di Perusahaan yang berada di Provinsi Bengkulu, sehingga capaian kinerja dapat terealisasi sebesar **99 persen meningkat** apabila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar **82 persen**. Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan **meningkat 17 persen** dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023. Jika dibandingkan tahun 2023 lalu, jumlah peserta tahun ini bertambah 40 orang. Dimana pada tahun sebelumnya peserta berjumlah **143 orang**, hal ini **dikarenakan** meningkatnya keinginan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja yang mencakup peningkatan pengetahuan keterampilan sikap dan perilaku melalui pengalaman kerja di perusahaan, dunia usaha industri yang kompeten dan siap kerja serta dapat mengurangi angka pengangguran.

Kegiatan ini menggunakan dana APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diberikan setiap tahunnya. Proses kegiatan magang dalam negeri dimulai dengan cara Calon peserta mendaftar akun siapkerja / sisnaker, Calon peserta memilih dan mendaftar pada lowongan magang yang dibuka, Proses seleksi calon peserta magang oleh perusahaan penyelenggara program magang, selanjutnya Proses penyelenggaraan magang di Perusahaan.

▪ **Pemagangan Luar Negeri (OVOP)**

Untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja, para mahasiswa atau lulusan baru dapat mengikuti program magang yang diadakan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Program magang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang siap kerja, yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dilengkapi dengan keahlian-keahlian yang diperlukan di dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan mengikuti program magang, dapat memberikan banyak manfaat bagi para mahasiswa yang masih kuliah atau yang sudah lulus, sehingga dalam mengikuti program magang, peserta dapat belajar sambil bekerja secara nyata di lingkup profesional yang dapat dilakukan di perusahaan dalam dan luar negeri. Mengikuti program magang di luar negeri tentunya manfaat yang didapatkan berbeda jika mengikuti program magang di dalam negeri. Adapun manfaat magang di luar negeri sebagai berikut:

1. Mendapat Relasi Baru

Dengan bertemu dengan orang-orang baru, dapat mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari relasi tersebut yang belum didapatkan sebelumnya.

2. Mendapat Surat Pengalaman Kerja Internasional

Setelah menyelesaikan magang di luar negeri, perusahaan tempat magang akan memberikan surat pengalaman kerja Internasional kepada peserta magang. Fungsi dari surat pengalaman kerja Internasional ini berguna untuk karir di masa depan. Dengan memiliki surat pengalaman kerja Internasional, *value* dan *prestige* seseorang tentunya akan naik.

Pada Tahun 2024 Jumlah calon peserta seleksi yang **mendaftar sebanyak 132 peserta**. Saat pelaksanaan pembukaan yang hadir sebanyak **114 peserta** dan yang mengikuti serangkaian tes, yang lulus sampai ketahap wawancara sebanyak **33 Orang peserta**. Dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2023 Jumlah calon peserta seleksi yang **mendaftar sebanyak 104 orang peserta**. Total terdapat **74 orang calon peserta yang hadir** untuk mengikuti serangkaian kegiatan seleksi, yang lulus sebanyak **16 Orang peserta**.

Peserta pemagangan di Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak **17 Orang** hal ini **disebabkan** oleh jumlah angkatan kerja yang tinggi dan serapan tenaga kerja yang menurun mengakibatkan persaingan yang sangat kompetitif, calon tenaga kerja perlu mempersiapkan kompetensi, kecakapan dan kesiapan kerja yang memadai guna memasuki pasar tenaga kerja.

Seleksi program magang ke Jepang kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan IM Japan dan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dibuka oleh Asisten II Setda Bengkulu R.A Denny bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Bapak Dr. H. Syarifuddin, S.Sos., M.Si dan pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu di aula Hotel Adeeva, Kota Bengkulu. Tim seleksi pusat dihadiri Koordinator Substansi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri Kemnaker RI Buchari dan Direktur IM Japan Jakarta Mrs. Ozawa Yoriko. Dalam arahnya, Program Pemagangan ke Jepang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu dan peserta yang lulus bisa meningkatkan kemampuan dibidang teknik dan membantu perekonomian di Bengkulu dengan membangun usaha.

- **Penciptaan 100 lapangan kerja melalui wira usaha baru**

Pada Tahun 2024 dapat terealisasi capaian kinerja sebesar **94,95 persen** dimana target ditetapkan **sebesar 198 Unit** dan dapat terealisasi sebanyak **188 Unit** serta target sebanyak **3 alat kejuruan dan dapat terealisasi 3 alat kejuruan**. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dapat menjalankan kegiatan dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga bantuan peralatan dapat disalurkan ke masyarakat dengan jumlah rincian barang sebanyak **188 unit** untuk masyarakat di 9 Kabupaten/Kota, serta 3 (tiga) alat praktek kejuruan di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Kepahiang diantaranya adalah:

3. Kejuruan Barista. Jenis barang diantaranya berupa Grinder Mazzer sebanyak 4 Unit, Katel Brewista 8 Unit, Rok Preso 4 Unit, V60 8 Unit, Kotak Sampah Plastik 4 buah.
4. Alat Praktek Kejuruan Tata Rias. Jenis barang diantaranya berupa Steamer rambut with ozone sdhl-5018 2 buah, Lemari Penyimpanan 4 set, Massage bed type 5 (tempat tidur facial) 8 buah, Washlap 4 lusin, kaca hias kecil (cermin) 16 buah, kursi makeup alumunium 8 buah, kuas makeup 16 set, Set Alat Perawatan Tangan / Kuku 2 set.
3. Alat Praktek Kejuruan Tata Boga. Jenis barang diantaranya berupa Oven Gas LPG 2 pintu 90x55x70cm lengkap 2 unit, Kompor Gas 2 Tungku 2 unit, Tabung Gas 2 unit, Meja Kerja Stenlis uk 180x72x85 4 unit, Hand Mixer (Mixer Tangan) 16 unit, dan jenis lainnya.

Masyarakat pada umumnya menerima bantuan dalam kelompok kerja / LPK (Lembaga Pelatihan kerja), IKM, Majelis Ta'lim, PKK Desa, Karang Taruna dan Lembaga masyarakat lainnya yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota. Sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dengan membuka usaha mandiri. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu akan selalu meningkatkan pelayanan dan bantuan peralatan / pelatihan ke masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota untuk mendukung program pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu melalui kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Dengan adanya bantuan peralatan pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat diantaranya untuk :

1. Meningkatkan produktivitas dan kinerja diri sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait pekerjaan.
2. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki, menambah kepercayaan diri dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif.
3. Meningkatnya kemampuan yang dapat memperluas kesempatan bekerja.

▪ **Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan diantara perusahaan dengan pegawai pada perusahaan tersebut. Pada Tahun 2024 jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial **sebanyak 30 kasus**, yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 18 kasus, masih dalam proses 11 kasus dan 1 kasus yang ditutup. Pada Tahun 2024 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **ditargetkan 10 kasus**, dan dapat diselesaikan sebanyak 18 kasus, sehingga **capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 180 persen**.

Pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 persen, dimana jumlah kasus yang dihadapi sebanyak **29 kasus** dan dapat terselesaikan sebanyak **14 kasus**. Target kasus yg terselesaikan pada **Tahun 2023 sebanyak 10 kasus**, yang dapat terselesaikan sebanyak **14 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 140 persen**. Meningkatnya capaian kinerja ini **disebabkan karena** semakin bertambahnya kasus perselisihan pada perusahaan yang dapat diselesaikan, dan pekerja mulai memahami tentang berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan prosedur tata cara penyelesaian masalah hubungan industrial serta berbagai masalah ekonomi perusahaan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 dengan permasalahan perselisihan berupa PHK ada 12 (dua belas) kasus, masalah perselisihan hak sebanyak 7 (tujuh) kasus dan masalah perselisihan kepentingan sebanyak 1 (satu) kasus, diantaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama, penyelesaian dalam proses, Ditutup karena pekerja mencabut surat pengaduan. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat 3 (tiga) langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. **Perundingan bipartit** adalah perundingan antara pengusaha/gabungan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Pada prinsipnya memang ketika terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila perundingan bipartit ternyata mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak.

Perjanjian bersama ini bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Setelah itu, perjanjian bersama wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Sehingga, jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, apabila perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. **Perundingan tripartit** adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, **gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial** dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial.

**DAFTAR PENYELESAIAN KASUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI
DISNAKERTRANS PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL PENGADUAN	NAMA PARA PIHAK	ALAMAT	MASALAH PERSELISIHAN	PENYELESAIAN	KET
1	10 Januari 2024	Pamor Ganda (Pengusaha) Tangkas Pardosi (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Iriyanti Manurung, SH Budi Sanjaya, S.Sos	Perjanjian Bersama
2	31 Januri 2024	Bening's Group (Pengusaha) Tassa Puti Yulianto dan Riska Devia Wulandari (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Iriyanti Manurung, SH	Perjanjian Bersama
3	02 Februari 2024	PT. Aguung Auto Mall (Pengusaha) Dorado David Putrado Devia Wulandari (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Iriyanti Manurung, SH	Perjanjian Bersama
4	10 Februari 2024	PT. Mahiza Karya Manndiri (Pengusaha) Suswanto dan M.Ainul Yakini (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH Iriyanti Manurung, SH	Perjanjian Bersama
5	04 Maret 2024	PT. Usaha Guna Manndiri (Pengusaha) Bendri Johannes dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama
6	14 Maret 2024	PT. Barokah Amanah Sentosa (Pengusaha) Yogi Ade Putra (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH Iriyanti Manurung, SH	Perjanjian Bersama
7	15 Maret 2024	Nerry Catering (Pengusaha) Bunga Apriani (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH Iriyanti Manurung, SH	Perjanjian Bersama
8	15 Maretl 2024	PT. Gesit Pratama (Pengusaha) Lia Ayu Lisandra (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH Iriyanti Manurung, SH	Dalam Proses
9	01 April 2024	PT. Abdi Anugrah Persada (Pengusaha) Dian Afriko Rahmadani (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH 2. Iriyanti Manurung, SH Arman Sugianto, S.Sos	Ditutup karena pekerja mencabut surat pengaduan
10	03 April 2024	PT. Otto Multi Artha (Pengusaha) Deni Rahmadani (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Budi Sanjaya, S.sos Riyenti Nuhar, SH	Perjanjian Bersama
11	30 April 2024	PT. Jalur Mandiri Utama (Pengusaha) Desi Aryani (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Iriyanti Manurung, SH	Pperjanjian Bersama
12	02 Mei 2024	PT. Bengkulu Gas energi SPBU 24. 383. 151 (Pengusaha) Muhammad Tommy Gunawan (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama
13	02 Mei 2024	PT. Airon/ Bandara (Pengusaha) Dedi dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama
14	20 Mei 2024	PT. Bengkulu Gas energi SPBU 24. 383. 15 (Pengusaha) Jhoni (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama
15	20 Juni 2024	PT. Thiasa Energi (Pengusaha) Agus Dian Syaputra (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama
16	24 Juni 2024	PT. Bencoolen Maritim Jaya (Pengusaha) Jhoni (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH., MH Tanty Marini, SH	Perjanjhioan Bersama
17	18 Juni 2024	PT. Riau Agrindo Agng (Pengusaha) Basmadi dkk (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH Budi Sanjaya, S.sos	Perjanjian Bersama

18	24 Juni 2024	PT. Bencoolen Mariim Jaya (Pengusaha) Noven Ardiano dkk (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH any Marini, SH	Perjanjian Bersama
19	25 Juni 2024	PT. Yayasan Darl Fikri (Pengusaha) Drs. Sadikin (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.sos	Dalam Proses
20	01 Juli 2024	Koperasi Konsmen Suaka Bahari pelabhan (Pengusaha) Wahyuni Dwi Darma dkk (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Ibrahim, SH.MH 2. Iriyanti Manurung, SH Arman Sugianto, S.Sos	Perjanjian Bersama
21	29 Juli 2024	PT. Bank Syariah Cabang Bengkulu (Pengusaha) Tiara Kania Dewi (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka.P, SH Iriyanti Manurung, SH	Dalam Proses
22	28 Agustus 2024	PT. Kimberly Borneo Resorces (Pengusaha) Widosi Ronal Hakiki dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Apriansyah Eka P, SH Arman Sugianto, S.Sos	Perjanjian Bersama
23	04 September 2024	Home Credit Indonesia (Pengusaha) Jela Anggraini dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Apriansyah Eka P, SH Budi Sanjaya, S.Sos	Dalam Proses
24	26 September 2024	PT. Citra Nusa Persada Lestari (Pengusaha) Drs. Tusri Yulius Asri (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Kepentingan	1. Ibrahim, SH.MH Tanty Marini, SH	Dalam Proses
25	10 Oktober 2024	PT. Yaysan Darul Fikri (Pengusaha) Sriyanto dan Mahadan (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka.P, SH 2. Budi Sanjaya, S.Sos Suparno, SH.MH	Dalam Proses
26	05 November 2024	PT. Home Center Indonesia Retail (Informal) (Pengusaha) Aprilia Wulandari (Pekerja)	Bengkulu	Perselisihan Hak	1. Iriyanti Manurung, SH Tanty Marini, SH	Dalam Proses
27	06 November 2024	PT. Riau Agrindo Agung (Pengusaha) Rasiyandi dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Apriansyah Eka P, SH Arman Sugianto, S.Sos	Dalam Proses
28	11 November 2024	PT. Zoomilion Indonesia Heavy Industry (Pengusaha) Deo Rizky Vanchris (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Apriansyah Eka Putra, SH Budi Sanjaya, S.Sos	Dalam Proses
29	13 November 2024	PT. Dos Ni Roha (Pengusaha) Laras Putri Wulandari (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Iriyanti Manurung, SH Tanty Marini, SH	Dalam Proses
30	16 November 2024	PT. Purnawira Dharma Upaya (Pengusaha) Dalton Facific dkk (Pekerja)	Bengkulu	PHK	1. Ibrahim, SH.MH 2. Tanty Marini, SH	Dalam Proses

Sumber : Bidang HI dan Pengawasana Disnakertrans 2023

1 Perjanjian bersama	: 18 Kasus	3. Dalam Proses	11 kasus	5.1 kasus. Kasus yang ditutup
2 Anjuran	: 0 Kasus	4. Dilimpahkan ke Dinasker Kota	0 kasus	

- **Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial**

Tabel 3.6
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

No	Uraian	Satuan	Tahun
			2024
1	Jumlah kasus pada perusahaan	Kasus	30
2	Jumlah penyelesaian kasus	Kasus	30

Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Jumlah Penyelesaian Kasus

Jumlah Kasus

X 100

- **Persentase Perusahaan Taat NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria)**

Tabel 3.7
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Kinerja : Persentase Perusahaan Taat NSPK
(Norma Standar, Prosedur dan Kriteria)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
			2024
1	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	9.033
2	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	9.033
3	Jumlah Perusahaan Yang menerapkan Peraturan Perundangan	Perusahaan	9.033
4	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan	Perusahaan	9.033
5	Jumlah Kasus Industrial Perselisihan Hubungan	Kasus	30
6	Jumlah Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama	Kasus	18

Sumber data : Satu data ketenagakerjaan RI

Perusahaan di Provinsi Bengkulu berjumlah **9.033**, yang terdiri dari **8.176 Perusahaan** Mikro, 391 Perusahaan Kecil, 336 Perusahaan Menengah dan 130 Perusahaan Besar.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 100 persen, persentase perusahaan Yang menerapkan Peraturan Perundangan **100 persen**, persentase Perusahaan Yang Terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan 100 persen, persentase jumlah Kasus Yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama 100 persen. Dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian kinerja **meningkat 28 persen**, hal ini **dikarenakan** perusahaan-perusahaan di Provinsi Bengkulu memahami bahwa dokumen WLKP menjadi salah satu syarat utama sebelum perusahaan dapat mengajukan permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

▪ **Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025 Sebesar **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Dibandingkan pada tahun sebelumnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu **meningkat sebesar Rp. 251.759,-** (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dimana Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2024 **sebesar Rp. 2.418.280,-** (Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.632.DKKTRANS.Tahun 2024 tentang Upan Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025, maka untuk perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upan Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis akan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025. Jika upah minimum meningkat maka diharapkan produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat.

▪ **Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Selain menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk seluruh kabupaten dan kota.

Di antara sejumlah kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi tersebut, Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah dengan UMK terbesar di tahun 2023 ini, yakni sebesar **Rp 3.052.118,-** (Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), UMK ini lebih besar dari UMP Provinsi Bengkulu itu sendiri yang jumlahnya **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Selain Kabupaten Mukomuko yang mengalami kenaikan UMK, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara juga dapat meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk Tahun 2024. Hal ini tentu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi perekonomian dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu.

Berikut ini adalah daftar lengkap UMK Tahun 2024 yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Bengkulu:

- | | |
|---|--|
| • Kabupaten Mukomuko: Rp 3.052.118,- | • Kabupaten Lebong: Rp 2.418.280,- |
| • Kota Bengkulu: Rp 2.930.669,- | • Kabupaten Bengkulu Utara: Rp 2.754.653,- |
| • Kabupaten Bengkulu Tengah: Rp 2.816.835,- | • Kabupaten Seluma: Rp 2.418.280,- |
| • Kabupaten Kepahiang: Rp 2.418.280,- | • Kabupaten Bengkulu Selatan: Rp 2.418.280,- |
| • Kabupaten Rejang Lebong: Rp 2.418.280,- | • Kabupaten Kaur: Rp 2.418.280,- |

Kenaikan UMK untuk tahun 2024 ini diharapkan bisa membantu para pekerja di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik. Penerapan UMK yang baru ini akan dimulai sejak awal tahun, tepatnya per tanggal 1 Januari 2024 ini. Keputusan Gubernur Bengkulu NOMOR : M.647.DKKTRANS.TAHUN 2024 Program / kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN	%
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp. 221.000.000,-	Rp218.490.071,-	98,86
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Rp.3.469.000.000 ,-	Rp3.450.950.827,-	99,47
		2. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan)	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 120.000.000,-	Rp.117.532.100,-	97,94
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 2. Perluasan Kesempatan Kerja 3. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 100.000.000,- Rp. 260.000.000,- Rp. 150.000.000,-	Rp98.445.140,00,- Rp254.284.779,- Rp141.723.000,-	98,44 97,80 94,48
		2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 90.000.000,-	Rp89.846.000,-	99,82
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 130.000.000,-	Rp127.827.900,-	98,32

		2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp. 125.000.000,-	Rp121.597.900,-	97,27
			2. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 160.000.000,-	Rp156.239.440,-	97,64
5.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp. 160.000.000,-	Rp154.121.400,-	96,32
			2. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	Rp. 110.000.000,-	Rp103.915.000,-	94,46
			3. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	Rp. 100.000.000,-	Rp96.161.000,-	96,16
			4. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	Rp. 80.000.000,-	Rp75.358.602,-	94,19

Sasaran 2
TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

Sasaran *terselenggaranya pembangunan transmigrasi* diukur dengan indikator kinerja *persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan*. Kawasan Transmigrasi memiliki pengertian kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi (Undang Undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian).

Kawasan Transmigrasi juga memiliki pengertian suatu hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang terletak dalam wilayah administrasi otonom, terdiri dari desa-desa bentukan transmigrasi, desa-desa yang ada sekitar permukiman dan areal-areal yang potensial untuk pembangunan permukiman transmigrasi dan berpotensi pengembangan komoditas unggulan yang dihubungkan dalam satu kesatuan jaringan jalan sehingga dapat mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: PER.15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi).

1. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
2. **Transmigran** adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.
3. **Wilayah Pengembangan Transmigrasi** adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. **Lokasi Permukiman Transmigrasi** adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. **Pembangunan permukiman transmigrasi** adalah kegiatan fisik pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana transmigrasi serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.
6. **Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi** merupakan pengembangan dari hasil pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Arah pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada dasarnya sesuai dengan sasaran penyelenggara di Bukit Merbau. Selain itu pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.

7. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan mental sepiritual.

Pengukuran capaian kinerja indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

▪ **Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**

Pada Tahun2024 kawasan transmigrasi yang dikembangkan ditargetkan sebanyak 5 kawasan. Diantara 5 kawasan tersebut 4 kawasan Provinsi Bengkulu 1 kawasan lainnya merupakan Prioritas Nasiional yaitu kawasan Lagita terletak di Bengkulu Utara.

Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi **sebesar 64,35 persen**. Dibandingkan dengan tahun 2023 **meningkat sebesar 7,21 persen** dimana capaian kinerja pada Tahun 2023 **sebesar 57,14 persen**. Hal ini dikarenakan terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong) seperti adanya pembangunan jalan poros serta pembangunan jembatan sehingga dapat memberikan akses jalan bagi masyarakat transmigrasi yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih baik. Selain pembangunan jalan dan jembatan juga diberikan bantuan jatah hidup (jaduk) untuk masyarakat di SP Binaan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan), bantuan berupa beras rata-rata sebanyak 11 - 14 kg per jiwa dalam 1 KK. SP Binaan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) pada tahun 2024 bertambahn 11 KK dengan 38 jiwa sehingga jumlah beras yang dapat diberikan sebanyak 420,5 kg selama 1 tahun. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui dana APBD dan APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)dalam hal ini selalu melakukan pengembangan kawasan transmigrasi setiap tahunnya untuk masyarakat transmigrasi dapat lebih diperhatikan, dalam hal ini dilakukannya monitoring dan evaluasi ke setiap kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendataan perkembangan pada setiap kawasan transmigrasi.

Tabel 3.8
Unit Permukiman Transmigrasi sampai dengan Tahun 2024

NO	NAMA KAWASAN	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	LUAS (Ha)	PENETAPAN KAWASAN OLEH KEMENTERIAN	KETERANGAN
1	Kawasan Enggano (Bengkulu Utara)	56,93 %	23.491,07	Kepmen No. 91 Tahun 2016	Perkiraan Jumlah SKP 3, Terdiri dari 842 KK, Perkiraan SP Baru 4, perkiraan SP Tempatan 2 dengan komoditas : Ubi Jalar, Kacang Tanah

2	Kawasan Lagita (Bengkulu Utara)	-	99.941,82	Kepmen No. 9 Tahun 2016	Jumlah SKP 4, Terdiri dari 26.057 KK, Potensi SP Baru 6, Potensi SP Tempatan 4 dengan komoditas : Karet, Pinang, Kopi dan Kelapa
3	Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan)	64,35%	18.420,43	Kepmen No. 71 Tahun 2018	Jumlah SKP 4, Terdiri dari 7.436 KK, Bantuan Gamelan, Jaduk untuk masyarakat trans
4	Kawasan Muara Sahung (Kabupaten Kaur)	43,49%	30.160,77	Kepmen No. 104 Tahun 2017	Jumlah SKP 4, Terdiri dari 3.600 KK, Potensi SP Pugar 1 dengan komoditas : Padi, Ubi, Kelapa dan Sawit
5	Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong)	54,96%	67.010,07	Kepmen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 106 Tahun 2018	Jumlah SKP 7, Terdiri dari 33.472 KK, komoditas unggulan : kopi, karet, gula aren, sayur mayur dan budidaya perikanan darat Cat : Tahun 2024 adanya pembangunan jalan poros (pengerasan jalan/ jalan cor) serta pembangunan jembatan.

▪ **Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan**

Tabel.3.9

Tujuan : Membangun Infrastruktur Strategi dan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi

Indikator Tujuan : Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan Dikembangkan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Kawasan	5	2	2	5	100
2.	Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan Dikembangkan	Persentase	57,14%	56%	57,14%	64,35%	112,61

- Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan, dengan rumus :

Persentase Tingkat Capaian =

Realisasi

Target

X 100

=

5

5

X 100

= 100%

- Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan rumus :

Persentase Tingkat Capaian =

Realisasi

Target

X 100

=

64,35

57,14

X 100

= 112,61%

▪ **Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Tahun 2024 jumlah pembangunan kawasan transmigrasi ditargetkan berjumlah 5 kawasan, dari 5 kawasan tersebut hanya 2 kawasan yang dapat dibangun dan diberikan bantuan peralatan, yaitu terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong), sedangkan 3 (tiga) kawasan lainnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan Pembangunan Kawasan transmigrasi, Sehingga capaian kinerja **Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar 100 persen**. Tingkat capaian ini masih sama dengan capaian kinerja pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2024 terlaksananya peningkatan pembangunan seperti pembangunan kawasan transmigrasi berupa pembangunan jalan poros serta pembangunan jembatan (menggunakan dana APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Selain pembangunan jalan dan jembatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dana APBD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu juga dapat memberikan bantuan ke Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) berupa Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal). Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) mayoritas penduduk berasal dari Suku Jawa dengan ini dalah satu bantuan yang diberikan adalah berupa 1 (satu) paket Gamelan, Dimana diharapkan dengan diberikannya bantuan ini Masyarakat dapat menggunakan alat ini pada saat perayaan atau kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan

sehingga Masyarakat mempunyai mata pencarian lainnya selain bercocok tanam atau bertani. Selain berupa Gamelan masyarakat di Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) juga mendapatkan bantuan seperti peralatan untuk pengolahan bahan makanan hasil budidaya Masyarakat sendiri seperti peralatan pembuatan keripik pisang dan keripik ubi serta peralatan pendukung lainnya, tentu saja hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Masyarakat untuk menjadi lebih pintar dan mempunyai kemampuan / skill dalam pengolahan bahan mentah hasil budidaya pekarangan sendiri sehingga dapat menciptakan usaha mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih layak.

Untuk Kawasan lainnya ditargetkan pada tahun berikutnya untuk dapat diberikan bantuan. Selain kegiatan ini, pada Tahun 2024 juga dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi serta dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Program / kegiatan yang mendukung Sasaran Terselenggaranya Pengembangan Kawasan Transmigrasi yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN	%
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	100
			1. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100
			3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.950.752,-	99,83
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Rp. 220.000.000,-	Rp. 204.450.998,-	92,93

Sasaran 3

MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Sasaran : Nilai SAKIP

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	Nilai	BB	BB (74,35)	BB (75,35)	BB (77,45)	100
Persentase Capaian Sasaran ini adalah							100

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa nilai sebesar **77,45 dengan predikat “BB”**. Dengan capaian tersebut dapat dilihat **capaian kinerja pada Tahun 2024 100 persen** sama dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menunjukkan **peningkatan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 2,1 point** apabila dibandingkan dengan Tahun 2023.

Tabel 3.11
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	30,00	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	25,00	19,25
Nilai Hasil Evaluasi			75,35		77,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen perencanaan perencanaan kinerja yang mencakup Renstra yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja serta Dokumen lainnya, serta telah melakukan pengukuran kinerja yang terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Bengkulu telah menyusun laporan kinerja setiap tahunnya, dan telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan secara berjenjang.

Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Bengkulu akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi pada upaya implementasi SAKIP dan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Program / kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 66.440.000,-	Rp. 63.189.316,-	95,10%

Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun 2024 memiliki target 2 laporan dengan realisasi tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.12

Tabel 3.12
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Output Program	Target	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan			70,02%	63,20%	
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun		100	98,86
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			75,10%	71,71%	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih		88,16	98,71
				Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		89,53	97,94

			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		62,72	99,82
			Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		180	98,32
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja)		100	96,32
2.	Terselenggaraanya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan			57,14%	64,35%	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi		100	99,95
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan		64,35	92,93
3.	Meningkatnya Tatakelola OPD	Nilai SAKIP Disnakertrans			BB	BB	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	95,10

Interprestasi berdasarkan tabel diatas menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

No.	Nilai Absolut	Predikat	Interprestasi
1.	> 90 – 100	AA	(Sangat Memuskan), Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	> 80 – 90	A	(Memuaskan), Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	> 70 – 80	BB	(Sangat Baik), erdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

			berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	> 60 – 70	B	(Baik), Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	> 50 – 60	CC	(Cukup Memadai), erdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	> 30 – 50	C	(Kurang), Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	> 0 – 30	D	(Sangat Kurang), Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan dengan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun.
2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Perusahaan yang Taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja).
3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan Indikator Kinerja Output Program Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
4. Program Hubungan Industrial, dengan Indikator Kinerja Output Program Kinerja Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selain capaian dengan predikat sangat memuaskan ada juga beberapa program kegiatan dengan capaian memuaskan, diantaranya adalah :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang dilatih.

Capaian dengan predikat baik yaitu program :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan.
2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan Indikator Kinerja Output Program Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang baik, diantaranya yaitu pada Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Perusahaan yang Taat NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja), dengan efisiensi anggaran mencapai 3,7 persen dan Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun dengan efisiensi anggaran mencapai 1,14 persen,

dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi, dengan Indikator Kinerja Output Program Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan efisiensi anggaran mencapai 4,9 persen. Masih terdapat pencapaian efisiensi anggaran yang masih rendah terdapat pada beberapa program lainnya, namun capaian kinerja dapat tercapai dengan baik untuk setiap program.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Pemangkasan anggaran(refocusing) menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, dengan ini hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja (Perguruan Tinggi, BLK Komunitas, LPK-LPK, BKK, Perusahaan-Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan), melakukan promosi Aplikasi siap Kerja (Pertemuan antara Pencari Kerja dan Pemberi Kerja) dapat dilihat lowongan kerja-lowongan kerja, dan bantuan modal usaha.
 - b. Menurunnya peningkatan kesadaran pelaku usaha dan tenaga kerja mengenai pentingnya hubungan kerja yang harmonis dilingkungan kerja serta perlindungan hak pekerja dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi mediator hubungan industrial melalui berbagai pelatihan terkait tugas pokok dan fungsinya.

B. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran dan realisasi keuangan setiap indikator kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 melalui kegiatan APBD dan APBN dapat dilihat di tabel pada halaman berikut ini.

Tabel 3.13
Pengukuran Realisasi Keuangan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN	%
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp. 221.000.000,-	Rp218.490.071,-	98,86
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Rp.3.469.000.000 ,-	Rp3.450.950.827,-	99,47
		2. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan)	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 120.000.000,-	Rp.117.532.100,-	97,94
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp. 100.000.000,-	Rp98.445.140,00,-	98,44
			4. Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 260.000.000,-	Rp 254.284.779,-	97,80
			5. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 150.000.000,-	Rp141.723.000,-	94,48
		5. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 90.000.000,-	Rp 89.846.000,-	99,82
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 130.000.000,-	Rp127.827.900,-	98,32
		2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp. 125.000.000,-	Rp121.597.900,-	97,27

		Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 160.000.000,-	Rp156.239.440,-	97,64
5.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp. 160.000.000,-	Rp154.121.400,-	96,32
			2.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	Rp. 110.000.000,-	Rp103.915.000,-	94,46
			6.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	Rp. 100.000.000,-	Rp96.161.000,-	96,16
			7.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	Rp. 80.000.000,-	Rp75.358.602,-	94,19
6.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	100
			2. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100
			3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.950.752,-	99,83
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Rp. 220.000.000,-	Rp. 204.450.998,-	92,93
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 66.440.000,-	Rp. 63.189.316,-	95,10
TOTAL				Rp. 40.220.023.229	Rp. 39.300.251.051	97,69

Jumlah Anggaran seluruh kegiatan tahun 2024 : Rp. 40.220.023.229,-

Jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan tahun 2024 : Rp. 39.300.251.051,-

Capaian Realisasi Anggaran TA 2024 sebesar 97,71%

Capaian realisasi keuangan melalui dana APBD dan APBN pada tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu telah mencapai angka **97,69%** (sembilan puluh tujuh koma enam puluh Sembilan persen), dengan pagu **Rp. 40.220.023.229** dan realisasi anggaran **Rp. 39.300.251.051**. Sedangkan realisasi fisik sebesar **98,11%** (Sembilan puluh delapan koma sebelas persen). Tahun 2023 realisasi keuangan melalui dana APBD dan APBN sebesar **97,50%** (Sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu selama Tahun 2024 telah tercermin dalam Laporan Kinerja OPD yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terlihat dari capaian kinerja sasaran yang telah diraihinya.

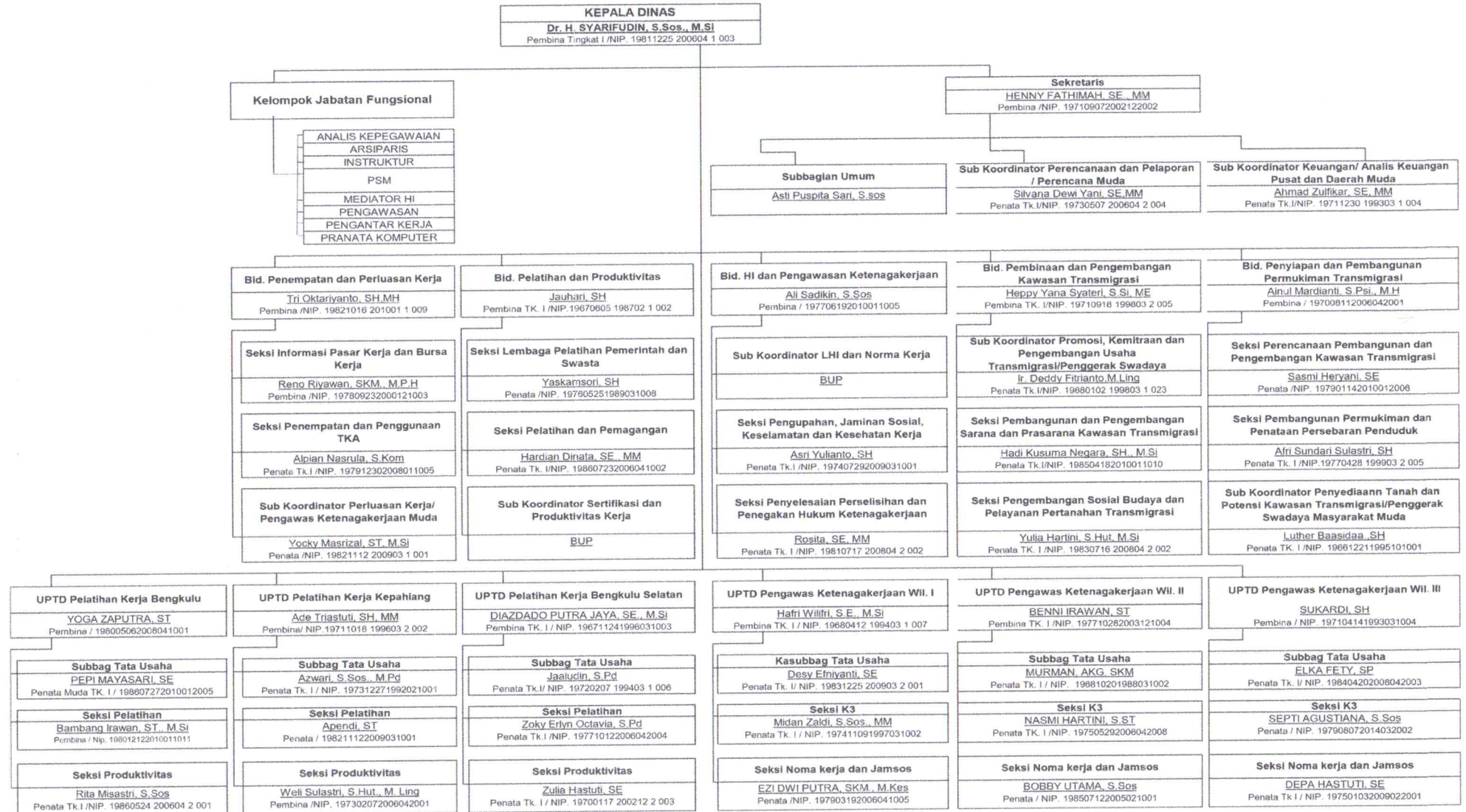
Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan menunjukkan tingkat capaian rata-rata sebesar **98,30 persen** untuk realisasi keuangan APBD dan APBN sebesar **97,69 persen** sedangkan realisasi fisik mencapai **98,11 persen**, yang berarti target-target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kinerja hampir tercapai secara maksimal.

- Faktor kunci keberhasilan pencapaian target kinerja :
 1. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui skilling, Upskilling dan Re- Skilling, pemagangan dan sertifikasi.
 2. Pemberdayaan masyarakat agar dapat bekerja mandiri/berwirausaha dan pendampingan terhadap Wira Usaha Baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan dapat berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
 3. Adanya peningkatan kapasitas LKS Bipartit dan optimalisasi Tim Deteksi Dini.
 4. Peningkatan pembinaan dan pemantauan Norma Kerja dan Norma K3 di perusahaan.
- Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD Lintas Sektor dan Pemerintah Pusat.
 2. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan dilakukan monitoring serta seleksi bagi kelompok-kelompok yang sudah layak untuk bisa mendapatkan pembinaan dari OPD terkait
 3. Sinergi dan kolaborasi dengan SDM Bidang K3 yang ada di perusahaan.
 4. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu secara lebih intensif.

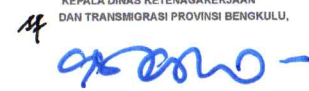
B. Saran

Saran yang dapat diambil adalah diperlukannya suatu pengorganisasian OPD yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan/kendala mengingat lingkup ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu cukup luas dengan akses yang masih terbatas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
BULAN MARET 2024**



KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU,



Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 198112252006041003

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENETAPAN PEMANFAATAN BARANG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK	SPK / KONTRAK		BANYAKNYA BARANG	SATUAN	JUMLAH		ASAL USUL	DIPERGUNAKAN PADA	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Lemari Besi 5 Rak Pintu Geser	RIONE	86/DKKTRANS-00/2024	25 Januari 2024	10	Unit	3.200.000	32.000.000	APBD	11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 1 Unit
										11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 1 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 1 Unit
										11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 1 Unit
										11.06.00.10.01.11.24	UPTD Wilayah I 1 Unit
										11.06.00.10.01.12.24	UPTD Wilayah II 1 Unit
										11.06.00.10.01.13.24	UPTD Wilayah III Manna 1 Unit
2	Lemari Besi 5 Rak Pintu Kaca Geser	RIONE	86/DKKTRANS-00/2024	25 Januari 2024	6	Unit	3.650.000	21.900.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Staf Keuangan 4 Unit
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 1 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 1 Unit
3	Lemari Pejabat bahan Jati	LOKAL	86/DKKTRANS-00/2024	25 Januari 2024	1	Unit	37.700.000	37.700.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 1 Unit
4	Lemari rak 1 muka Backplate dan Standar Buku	RIONE	86/DKKTRANS-00/2024	25 Januari 2024	6	Unit	4.480.000	26.880.000	APBD	11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 1 Unit
										11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 1 Unit
										11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 1 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 1 Unit
5	Meja Kerja Pimpinan	LOKAL	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	1	Unit	11.900.000	11.900.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 1 Unit
6	Sofa Set	INFORMA	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	6	Unit	18.300.000	109.800.000	APBD	11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 1 Set
										11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 1 Set
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Set
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 1 Set
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 1 Set
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan

7	Kursi kerja Staf	YESNICE	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	42	Unit	2.250.000	94.500.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 2 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 7 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Kasubbag Umum 3 Unit
										11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 6 Unit
										11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 7 Unit
										11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 5 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 5 Unit
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 5 Unit
8	Meja Kerja 1/2 Biro 3 Laci	RIONE	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	20	Set	3.600.000	72.000.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Tunggu Kadis 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit
										11.06.00.10.01.11.24	UPTD Wilayah I 2 Unit
										11.06.00.10.01.12.24	UPTD Wilayah II 2 Unit
										11.06.00.10.01.13.24	UPTD Wilayah III Manna 8 Unit
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 2 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 2 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Kepangan 1 Unit
											Ruang Aula 1 Unit
9	Kursi Hadap	INFORMA	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	20	Unit	2.120.000	42.400.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 8 Unit
										11.06.00.10.01.11.24	UPTD Wilayah I 2 Unit
										11.06.00.10.01.12.24	UPTD Wilayah II 2 Unit
										11.06.00.10.01.13.24	UPTD Wilayah III Manna 2 Unit
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 2 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 2 Unit
											Ruang Sekretaris Dinas 2 Unit
10	Kursi siswa	INFORMA	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	260	Unit	870.000	226.200.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 130 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 130 Unit
11	Kursi Rapat Neo Flyx	INFORMA	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	231	Unit	780.000	180.180.000	APBD	11.06.00.10.01.11.24	UPTD Wilayah I 10 Unit
										11.06.00.10.01.12.24	UPTD Wilayah II 10 Unit
										11.06.00.10.01.13.24	UPTD Wilayah III Manna 21 Unit
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 100 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 90 Unit
12	Meja Kerja Staff Admin Kantor 4 Orang Cubicle Partisi Sekat set	LOKAL	71/DKKTRANS-00/2024	22 Januari 2024	2	Set	21.900.000	43.800.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Staf Keuangan 2 Set

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENETAPAN PEMANFAATAN BARANG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK	SPK / KONTRAK		BANYAKNYA BARANG	SATUAN	JUMLAH		ASAL USUL	DIPERGUNAKAN PADA	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	I. Alat Kejuruan Barista										
1	Grinder Mazzer	SUPER JOLLY			4	Unit	29.369.250	117.477.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
2	Katel Brewista	BREWISTA			8	Unit	2.619.250	20.954.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
3	Rok Preso	ROK			4	Unit	6.116.250	24.465.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
4	V60	HARIO			8	Unit	455.000	3.640.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
5	Kotak Sampah Plastik	YUTAKA			4	Buah	166.000	664.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
	II. Alat Praktek Kejuruan Tata Rias		176/DKKTRANS-00/2024	22 Februari 2024							
1	Steamer rambut with ozone sdhl-5018	DE RUCCI			2	Buah	12.292.250	24.584.500	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
2	Lemari Penyimpanan	RIONE			4	Set	4.625.550	18.502.200	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
3	Massage bed type 5 (tempat tidur facial)	LOKAL			8	Buah	3.072.500	24.580.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
4	Washiap	LOKAL			4	Lusin	300.550	1.202.200	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
5	kaca hias kecil (cermin)	INFORMA			16	Buah	243.550	3.896.800	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
6	kursi makeup aluminium	LOKAL			8	Buah	5.614.550	44.916.400	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
7	kuas makeup	ARMANDO CARUSO			16	Set	666.550	10.664.800	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
8	Set Alat Perawatan Tangan / Kuku	LOKAL			2	Set	32.176.550	64.353.100	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
	III. Alat Praktek Kejuruan Tata Boga		176/DKKTRANS-00/2024	22 Februari 2024							
1	Oven Gas LPG 2 pintu 90x55x70cm lengkap	AGE			2	Unit	4.519.000	9.038.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
2	Kompor Gas 2 Tungku	RINNAI			2	Unit	757.000	1.514.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
3	Tabung Gas	LOKAL			2	Unit	367.000	734.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
4	Meja Kerja Stenlis uk 180x72x85	GETRA			4	Unit	6.255.000	25.020.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
5	Hand Mixer (Mixer Tangan)	PHILIPS			16	Unit	910.000	14.560.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
6	Blender	PHILIPS			4	Unit	1.261.900	5.047.600	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
7	Slipat 40 cm x 60 cm x 0,75 mm (Bisa Masuk Oven)	LOKAL			8	Lembar	45.000	360.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
8	Cover Plastik Rak Roti 47x63x170, 15 rak	LOKAL			2	Buah	996.000	1.992.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
9	Bread Slicer Cetak Potong Roti Tawar	BREAD SLICER			4	Buah	73.000	292.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
10	Box Penyimpanan Donat 12 Buah	VARIA PACK			20	Buah	54.900	1.098.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
11	Cetakan Kue Lubang Datar (Bahan Teplon)	LOKAL			8	Buah	183.700	1.469.600	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
12	Teplon	MAXIM			2	Buah	158.000	316.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
13	Panci kecil tangkai satu/ panci indomie kecil	SNAW PAN			4	Buah	108.000	432.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
14	Mangkok stenlis besar	GANOM			2	Buah	73.000	146.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
15	Sendok Makan	GANOM			4	Lusin	45.000	180.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang

16	Piring Saji putih untuk kue keramik	BLANC		4	Buah	108.000	432.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
17	Colling Rack sterilis + Nampan	LOKAL		8	Buah	152.000	1.216.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
18	Colling Rack Trolley Loyang 20 Bertingkat	GETRA		8	Buah	4.158.000	33.264.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
19	Spatula Kue gagang kayu untuk muluskan krim	LOKAL		8	Buah	64.000	512.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
20	Pastry Brush	GANOM		8	Buah	26.000	208.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
21	Dandang Klakat ukuran 45x45	LOKAL		1	Buah	816.000	816.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
22	Pisau Dapur keramik satu Set	DIAMON		4	Buah	405.000	1.620.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
23	Scraper Stenlis	RAJA SETIA		8	Buah	45.000	360.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
24	Mat Silicone atau alas adonan	LOKAL		4	Buah	99.000	396.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
25	Termometer	LOKAL		2	Buah	228.000	456.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
26	Rak Bahan dan Peralatan Kue	LOKAL		2	Buah	2.711.000	5.422.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
27	Piring makan biasa	SUNBIRD		4	Lusin	329.000	1.316.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
28	Timbangan Digital	OXONE		12	Buah	813.900	9.766.800	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
29	Pisau roti elektrik	SICO FULCADO		2	Buah	1.896.000	3.792.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
30	Pisau kue sterilis panjang 32 cm	SUPER DOLL		4	Buah	57.000	228.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
31	Nampan Tiris Minyak	GANOM		4	Buah	278.000	1.112.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
32	Mangkok kaca cuci tangan	LOKAL		2	Lusin	405.000	810.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
33	Kuali Gorengan anti lengket	HOME PRO		2	Buah	464.000	928.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
34	Sutit	GANOM		4	Buah	64.000	256.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
35	Jepitan gorengan	HOME PRO		4	Buah	45.000	180.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
36	Lap Meja	LOKAL		2	Lusin	108.000	216.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
37	Kontainer penyimpanan bahan dan alat	SL PLASTIC		2	Buah	2.717.000	5.434.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
38	Balon whisk besar 30 cm	LOKAL		4	Buah	89.000	356.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
39	Pastry Knife	KITCHEN KNIFE		4	Buah	38.000	152.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
40	Toples Set	LOKAL		4	Set	373.000	1.492.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
41	Penyaring tepung sterilis	LOKAL		4	Buah	83.000	332.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
42	Spatula Scraper Pizza	LOKAL		4	Buah	64.000	256.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
43	Pisau Rolling	LIQTA		4	Buah	45.000	180.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
44	Loyang bulat biasa	LOKAL		4	Buah	35.000	140.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
45	Gelas ukur 1 Liter	OWL PLAST		2	Buah	36.000	72.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
46	Rolling pin Stenlis	LOKAL		4	Buah	89.000	356.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
47	Solet silikon Besar panjang 30 cm	GANOM		4	Buah	64.000	256.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
48	Solet silikon kecil atau ukuran biasa	GANOM		4	Buah	26.000	104.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
49	Loyang bolu gulung	LOKAL		4	Buah	46.000	184.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
50	Pembuka kaleng	LOKAL		2	Buah	73.000	146.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
51	Telenan Besar anti slip	KRIS		4	Buah	162.000	648.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
52	Ring Cutter sterilis Set	LOKAL		4	Set	57.000	228.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
53	Parutan keju sterilis	VEGETABLE SLICER		4	Buah	19.000	76.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
54	Teplon kue lumpur	HEAVY CAL		2	Buah	228.000	456.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
55	Teplon walik	MOUGEN		4	Buah	199.000	796.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
56	Loyang cupcake atau muffin	LOKAL		4	Buah	73.000	292.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
57	Loyang brownies	LOKAL		8	Buah	19.000	152.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
58	Loyang bolgul kecil	LOKAL		4	Buah	32.000	128.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
59	Loyang mini	MAKIM		8	Buah	310.000	2.480.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
60	Mini kuas silikon	GANOM		16	Buah	16.900	270.400	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang

61	Balon whisk sedang 22 cm	LOKAL			8	Buah	76.000	608.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
62	Meja putar sterilis besi	LOKAL			2	Buah	727.000	1.454.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
63	Loyang tulban diameter 20 cm	LOKAL			8	Buah	45.000	360.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
64	Kuas loyang silikon untuk loyang YH 0635	GANOM			8	Buah	32.000	256.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
65	Troli Loyang Tingkat 20	GETRA			2	Buah	4.158.000	8.316.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
66	Mesin Penggiling Adonan Serbaguna	PANDA SCALE			2	Unit	2.399.000	4.798.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
67	Kulkas 2 Pintu	SHARP			2	Unit	8.186.000	16.372.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
68	Kulkas Pendingin Minuman	SHARP			2	Unit	9.273.000	18.546.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
69	Sarung Tangan Oven	LOKAL			16	Pasang	190.000	3.040.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
70	Leman Kecil untuk perlengkapan masak	ATLANTA			2	Unit	9.098.000	18.196.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
71	Ring Roti Bulat dan Lonjong	LOKAL			2	Lusin	253.000	506.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
72	Timer / Alarm	KITCHEN TIMER			8	Unit	76.000	608.000	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
73	Kotak Sampah	YUTAKA			4	Buah	136.900	547.600	APBD	11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang
1	Notebook	SPC X1 Notebook	356/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	9	Unit	10.050.000	90.450.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit Erwin
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit Septi Marni
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan Silvana Dewiyani 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan Lenny Juwita 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan 1 Unit Benny Ricardo
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan 1 Unit Asti Puspita sari
										11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 1 Unit
										11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 1 Unit Yogi
										11.06.00.10.01.11.24	UPTD Wilayah I 1 Unit
2	Laptop	Lenovo	356/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	3	Unit	24.000.000	72.000.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 1 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Unit Hadi. KN
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 1 Unit Henny Fatmawati
3	PC All in One	ASUS	356/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	8	Unit	11.200.000	89.600.000	APBD	11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 1 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.12.24	UPTD Wilayah II 1 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 1 Unit
											UPTD Wilayah III 1 Unit
4	PC All in One	DELL	356/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	3	Set	21.000.000	63.000.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
5	Monitor lengkung	SAMSUNG	356/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	2	Unit	5.400.000	10.800.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit

6	Kamera CANON DSLR 1500D Kit	CANON	351/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Unit	13.150.000	13.150.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan 1 Unit
7	Sound System YAMAHA Performance Package 10A	YAMAHA	351/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	3	Unit	18.590.000	55.770.000	APBD	11.06.00.10.01.13.24	UPTD Wilayah I dan II 1 Unit
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 1 Unit
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 1 Unit
8	SOUND SYSTEM TYPE D	ASHLEY	351/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Unit	22.600.000	22.600.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 1 Unit
9	SAMSUNG LED 65BU8500 CRYSTAL UHD 4K SMART TV WITH	SAMSUNG	351/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Unit	37.700.000	37.700.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 1 Unit
	STANDING BRACKET SOUND SYTEM										
10	Meja Kerja 1/2 Biro 3 Laci	INFORMA	352/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	5	Unit	3.700.000	18.500.000	APBD	11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 1 Unit
11	Kursi siswa	INFORMA	352/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	50	Unit	895.000	44.750.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Gedung Aula
12	Meja Nakas 2 Laci	INFORMA	352/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Unit	3.200.000	3.200.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 1 Unit
13	Meja Kerja Staff Admin Kantor 4 Orang Cubicle Partisi Sekat set	LOKAL	352/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Set	21.950.000	21.950.000	APBD	11.06.00.10.01.08.24	Ruang Bendahara Gaji 1 Set
14	AC 3 PK PSF-3032 AC FLOOR STANDING	POLYTRON	354/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	2	Unit	25.100.000	50.200.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Staf Kadis 1 Unit
										11.06.00.10.01.01.24	Ruang Aula Lantai 2. 1 Unit
15	Scanner EPSON DS-410	EPSON	353/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	2	Unit	7.250.000	14.500.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit
16	EcoTank L3250 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer	EPSON	353/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	9	Unit	4.500.000	40.500.000	APBD	11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Keuangan 1 Unit
										11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja 1 Unit
										11.06.00.10.01.04.24	Bidang Lattas 1 Unit
										11.06.00.10.01.08.24	Bidang HI Pengawasan 1 Unit
										11.06.00.10.01.06.24	Bidang Pembinaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.07.24	Bidang Permukiman 1 Unit
17	Paket Device IP CCTV HIKVISION 16 Channel	HIKVISION	355/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	3	Paket	19.580.000	58.740.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Gedung Dinas 1 Paket
										11.06.00.10.01.09.24	UPTD PK Kepahyang 1 Paket
										11.06.00.10.01.10.24	UPTD PK Manna B/S 1 Paket
18	Proyektor VIEWSONIC VS16909	VIEWSONIC	355/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	2	Unit	8.090.000	16.180.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan 1 Unit
19	Microphone Wireless Anysong PMM-7118	Anysong	355/DKKTRANS-00/2024	23-Apr-24	1	Unit	6.480.000	6.480.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Umum dan Perlengkapan 1 Unit
1	PAD 6	XIAOMI	1051/DKKTRANS-00/2024	13-Nov-24	7	Unit	10.272.000	71.904.000	APBD	11.06.00.10.01.02.24	Ruang Staf Keuangan Widhi 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Staf Keuangan Yenni 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Perencanaan Rio 1 Unit
										11.06.00.10.01.02.24	Ruang Sekretaris Dinas Henny 1 Unit
										11.06.00.10.01.03.24	Bidang Penta Kerja Yocki 1 Unit
										11.06.00.10.01.01.24	Ruang Kadis 2 Unit

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU


Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si

NIP. 19811225 200604 1 003